



PREDIKSI KONDISI EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19 MELALUI KEBIJAKAN *STAY AT HOME* DAN *LOCKDOWN*

Entin Kartini¹, Deden Hadi Kushendar², Aep Saepudin³

- 1) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung
- 2) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Guna Nusantara
- 3) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung

Abstrak

World Health Organization (WHO) bahwa pandemi Covid-19 ini merupakan penyakit baru yang akan Tersebar melintasi batas negara ke seluruh belahan dunia. Saat ini pandemi Covid-19 mirip dengan flu, WHO mengumumkan flu ini pada 12 Maret, Pertama populer di Cina, kemudian menyebar ke seluruh dunia dalam beberapa bulan menjadi pandemi. Dalam penanganan pandemi di Indonesia yaitu dengan menerapkan kebijakan berdiam di rumah (*stay at home*), namun kebijakan ini menimbulkan dampak ekonomi yang buruk, sehingga berdampak terhadap inflasi yang tinggi. Untuk mengatasi itu maka pemerintah Indonesia telah Memberi bantuan sosial kepada masyarakatnya yaitu dengan memberikan stimulus Bantuan yang disalurkan melalui kartu sembako akan ditambah dari Rp. 150.000 per bulan menjadi Rp. 200.000 per bulan kepada 15.2 juta keluarga penerima selama 6 bulan sejak bulan Maret. Selain itu mensubsidi pajak penghasilan (PPh) kepada perusahaan manufaktur yang berpenghasilan dibawah Rp 200 juta per tahun, juga untuk mendukung pelaksanaan *stay at home* di daerah, maka Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat nomor S-116/PK/2020 tentang Pemberitahuan Penyaluran Dana Insentif Daerah tahun anggaran 2020 Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) supaya pelaksanaan *stay at home* di daerah dapat dilaksanakan.

Kata Kunci: Kondisi Ekonomi, Pandemi Covid-19, Kebijakan, *Stay at Home*, *Lockdown*.

*Correspondence Address : dedenhadikushendar@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v8i5.2021.1399-1405

© 2021UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Pandemi adalah wabah penyakit global, menurut World Health Organization (WHO). Ketika penyakit baru menyebar melintasi perbatasan di seluruh dunia, pandemi dinyatakan. Ada banyak contoh dalam sejarah, contoh terbaru adalah pandemi Covid-19. WHO menyatakan pandemi seperti flu ini pada 12 Maret 2020. Covid-19 pertama kali menyebar di China dan kemudian menyebar ke bagian lain dunia dalam beberapa bulan, menjadi pandemi. Wabah penyakit yang termasuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis penularan yang berkesinambungan, sehingga jika suatu kasus terjadi di beberapa negara selain negara asal, maka tetap akan diklasifikasikan sebagai pandemi. Sebagai contoh lainnya yaitu wabah virus Zika yang di mulai di Brazil pada tahun 2014 dan menyabar ke Karibia dan Amerika Latin merupakan epidemi, seperti juga wabah Ebola di Afrika Barat pada 2014 sampai dengan 2016 yang lalu (<https://www.wartaekonomi.co.id>).

The Guardian menyatakan bahwa WHO telah menekankan bahwa menggunakan kata pandemi tidak menandakan perubahan saran saran yang diberikan WHO kepada diseluruh dunia. WHO masih mendesak negara negara untuk Inspeksi, pengujian, pemrosesan, isolasi, pelacakan dan memobilisasi rakyat mereka. Selanjutnya Dr. Nathalie MacDermott, peneliti di Nasional Institute for Health Research yang juga merupakan dosen klinis klinis Kings Collage London, mengatakan bahwa : “Perubahan istilah tidak mengatakan apapun secara praktis karena dunia telah disarankan selama beberapa minggu terakhir untuk mempersiapkan pandemi potensial, yang diharapkan telah terjadi dan dianggap serius oleh semua, namun penggunaan istilah ini menyoroti pentingnya negara negara di seluruh dunia yang bekerja secara kooperatif dan terbuka satu sama

lain dan bersatu dalam upaya mengendalikan situasi ini.” (<https://tirto.id>).

Menghadapi pandemi Covid-19, tentu saja negara negara yang telah terjangkit harus melakukan berbagai upaya untuk menghentikannya. Seperti dilansir dari healthline, Direktur Jenderal WHO, Theodoros Ghebreyesus menetapkan empat hal utama yang harus dilakukan oleh suatu negara yaitu: 1) Mempersiapkan dan bersiap; 2) Deteksi, lindungi dan rawat; 3) Kurangi penyebaran; dan 4) Inovasi dan belajar. Ia Menyerukan semua negara untuk meningkatkan mekanisme tanggap darurat Covid-19 dan memberitahu Warga agar dapat melindungi diri dari virus Covid-19. Selain itu juga para pejabat kesehatan diinstruksikan untuk deteksi, isolasi, uji, dan rawat setiap kasus Covid-19, siapkan rumah sakit, dan pastikan petugas kesehatan terlindungi dari virus corona baru. Serta menghibau masyarakat tidak perlu panik dan selalu melakukan berbagai langkah pencegahan penyebaran virus, antara lain menjaga jarak, menggunakan disinfektan saat menyentuh permukaan, mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer secara rutin, menggunakan masker saat sakit, dan tidak menyentuh wajah.

Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo telah menghibau agar beraktivitas di rumah untuk mencegah penyebaran virus ini. Bahkan dinegara lain seperti di italia dan Malaysia mengimplementasikan lockdown untuk menekan angka penebaran virus. (<https://www.sehatq.com>). Puncak pandemi Covid-19 di Indonesia diperkirakan akan berlangsung hingga pertengahan April 2020, prediksi tersebut dikeluarkan oleh tim peneliti pada pusat Pemodelan dan Simulasi Matematika (P2MS) Institut Teknologi Bandung (ITB), yang dimotori oleh Dosen prodi matematika Dr. Nuning Nuraeni mengatakan puncak kasus

harian akan terjadi pada akhir maret dan berakhir bulan april 2020, mereka memprediksikan 600 kasus perhari. Ketua umum IDI, Dr. Daeng M. Faqih menilai prediksi tersebut untuk segera direspon oleh pemerintah. ia menekankan untuk memaksimalkan tes masal COVID-19, dan melakukan dengan tes masal dari rumah ke rumah kalo kelapangan maka kebijakan sosial distancing dan stay at home akan gagal. Presiden Joko Widodo mengupayakan rumah sakit darurat di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, bisa menampung 24.000 orang, juga memiliki 105.000 APD dan obat untuk didistribusikan ke daerah terdampak (<https://www.tirto.id>).

Pemerintah Indonesia saat ini telah melakukan Upaya memutus mata rantai penularan virus corona, himbuan physical distance (jarak fisik), work from home, belajar dirumah dan beribadah dirumah. Dengan kebijakan untuk beraktifitas dirumah akan berdampak terhadap sikap masyarakat yang menimbun persediaan makanan dirumah dan menimbulkan panic buying (Dani et al., 2021). Hal ini menimbulkan permasalahan kekurangan persediaan makanan karena permintaan yang terlalu tinggi terutama terhadap sembilan bahan pokok sehingga akan mengakibatkan harga semakin meningkat karena permintaan kebutuhan masyarakat sangat tinggi dibandingkan dengan persediaan barang yang ada. Ini akan berdampak terhadap inflasi yang akan terus meningkat.

Selain itu dengan menerapkan kebijakan stay at home (Akter, 2020; Dani et al., 2021; Hamadani et al., 2020; Kim et al., 2020; Qarnain et al., 2020; Ramdani, 2020; Toprak Celenay et al., 2020; Witteveen, 2020) oleh pemerintah akan berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat yang biasanya menikmati wisata kuliner ataupun berkunjung ke tempat wisata alam menjadi sangat berkurang bahkan akan hampir

tidak ada, Tentu akan berdampak terhadap pendapatan para pedagang yang bergerak dibidang jasa kuliner dan para pengusaha travel yang bergerak dibidang jasa wisata, diantaranya yaitu para pengusaha hotel dan restoran, pusat perbelanjaan/mall ditutup, kecuali yang berdagang dibidang makanan sembilan bahan pokok. Dengan diterapkannya stay at home dan social distancing (Akter, 2020; Kim et al., 2020; Qarnain et al., 2020) juga akan sangat berpengaruh terhadap pekerja harian lepas/borongan adalah pekerja yang menerima upah harian, yaitu menerima upah secara mingguan/bulanan berdasarkan hasil kerjanya, termasuk juga pekerja harian yang dibayar berdasarkan volume/hasil kerja yang dilakukan secara borongan, mereka tidak dapat bekerja. (<http://www.kamusbesar.com>). Dengan permasalahan tersebut akan sangat berdampak terhadap pendapatan daerah serta akan menurunkan daya beli masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Rosita, 2020; Somantri, 2005; Wahidmurni, 2017) mengenai kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19 dengan pendekatan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Sumber data primer berasal dari berita-berita online dari beberapa website penyedia berita yang dapat dipercaya oleh publik, lalu didukung dengan data-data beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggapi pandemi Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Stay at Home dan Lockdown

Dengan memberlakukan kebijakan stay at home dalam upaya pencegahan penyebaran virus Corona oleh pemerintah untuk mencegah

penyabaran virus Corona, demi keselamatan dan kesehatan orang tersebut. Di banyak negara menerapkan kebijakan stay at home atau bertahan diri di rumah selama pandemi virus ini atau setidaknya selama 14 hari (Kim et al., 2020). Menurut penelitian medis, angka 14 hari sesuai dengan masa inkubasi virus penyebab penyakit COVID-19. Tempering di rumah selama pandemi virus corona bertujuan untuk menghindari paparan virus corona. Kampanye stay at home juga bertujuan meminimalisasi aktivitas diluar rumah. Panggilan ini berlaku untuk sekolah, universitas, dan bisnis. Partisipasi semua pihak sangat diperlukan untuk mengurangi jumlah penularan global. (<https://www.liputan6.com>).

Kita perlu belajar dari negara lain yang lebih dahulu terjangkit virus ini, seperti Korea Selatan, masyarakat disana memiliki disiplin tinggi dan aktif memerangi Corona. Saat terdapat larangan untuk keluar rumah mereka patuhi. Jalan-jalan, area perbelanjaan, taman, tempat hiburan, fasilitas umum sepi, selalu bersih dan deteksi dini, hingga 15.000 tes per hari, secara signifikan memutus mata rantai penularan corona. Himbauan untuk tetap di rumah juga didukung oleh para pelaku bisnis, termasuk penutupan beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta, seperti Plaza Indonesia, Summarecon Mall, dan Senayan City. Begitu pula dengan buffer zone Jakarta seperti Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor juga telah menutup pusat perbelanjaan.

Alternatif yang bisa dilakukan selain pemberlakuan stay at home adalah lockdown (Akter, 2020; Dani et al., 2021; Hamadani et al., 2020; Kim et al., 2020; Qarnain et al., 2020; Toprak Celenay et al., 2020; Witteveen, 2020). Dari segi ekonomi, berdiam diri di rumah lebih baik daripada memblokir karena hanya membatasi aktivitas masyarakat dan tidak menghalangi pergerakan keluar masuk suatu daerah.. Namun langkah

stay home bukan tanpa resiko, Beberapa pekerjaan yang paling berpengaruh dari langkah ini antara lain supir angkot, transportasi online, pengusaha restoran, restoran, penjual makanan, hotel, event organizer, dan pekerja lepas harian. Omzet pekerjaan tersebut dapat turun secara signifikan. Sedangkan dari sisi kesehatan, langkah lockdown merupakan cara terbaik untuk memutus rantai penyebaran, baik lockdown pada tingkat kabupaten/kota maupun pada tingkat provinsi atau negara. Patuhi stay at home untuk meminimalisasi kebijakan lockdown. Negara yang telah melakukan lockdown seperti China, Filipina, Iran, Italia, Malaysia dan Spanyol merupakan negara kaya dan ekonomi yang stabil tidak sebesar pengaruhnya dibandingkan negara Indonesia yang mana dengan penduduk yang sangat besar dan penghasilan tidak merata. (<https://www.ayobandung.com>).

Pengaruh Ekonomi

Dengan mulainya penerapan stay at home dan lockdown yang ditetapkan oleh pemerintah, keadaan ekonomi Indonesia semakin lama semakin menurun. Bisa kita lihat dimana sekarang harga 1 USD sudah mencapai angka 16 ribu, yang dimana angka ini merupakan angka terbutuk sejak 20 tahun yang lalu, bahkan di sat terjadi krisis meneter tahun 1999, 1 USD tidak mencapai 16 ribu, tidak begitu buruh, yang artinya bahwa dengan dampak lockdown sangat terasa denngan ekonomi bangsa dan tentunya ekonomi masyarakat hingga melewati krisis moneter 1999. Dengan adanya lockdown dan anjuran stay at home, Masyarakat tidak bisa mendapatkan penghasilan, apalagi yang memiliki upah harian, tentu akan sangat terpengaruh. Tentu sebagai negara besar kita tidak ingin hal ini terjadi. Kami tidak menyalahkan pemerintah atas hal buruk di bidang ekonomi ini. Tentu saja pemerintah telah bekerja keras untuk memberikan

pelayanan terbaik bagi negara dan negara ini. Tidak hanya Indonesia yang terkena dampak di bidang ekonomi, tetapi negara lain juga terpengaruh. Berdasarkan analisis dampak Covid-19 ini membawa pengaruh buruk terhadap ekonomi Indonesia (<https://kompasiana.com>).

Antisipasi Dampak Stay at Home oleh Pemerintah

Menteri keuangan mengatakan pemerintah akan mewaspadai ancaman pelemahan ekonomi karena wabah corona demi mengejar target asumsi dasar ekonomi makro di APBN 2020. Stay at home/ work from home akan memiliki dampak terhadap konsumsi. Ketika tingkat pertumbuhan konsumsi menurun, hal ini dapat menekan tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan menjadi kurang lebih sama secara nominal. Untuk mengimbangi dampak COVID-19 terhadap konsumsi rumah tangga, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan.

Pertama, stimulus gelombang pertama dan kedua untuk menjaga daya beli. Pada stimulus gelombang pertama, bantuan yang disalurkan melalui kartu sembako bakal ditambah nominalnya dari Rp. 150.000 per bulan menjadi Rp.200.000 perbulan kepada 15,2 juta keluarga penerima manfaat selama 6 bulan sejak maret. Implikasinya, total anggaran yang bakal digelontorkan akan bertambah sebesar Rp 4,6 triliun dari Rp. 28,08 triliun dari APBN 2020. Pada stimulus gelombang ke dua, PPh Pasal 21 untuk pekerja di seluruh sektor manufaktur dengan penghasilan dibawah Rp. 200 juta bakal ditanggung oleh pemerintah terhitung sejak april 2020 hingga september 2020 diproyeksikan mencapai Rp. 8,6 triliun. Mantan menteri keuangan Chatib Basri menyampaikan apabila masyarakat mengurangi aktifitasnya diluar rumah termasuk berbelanja, menghindari keramaian, hingga kontak individu, maka

kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong permintaan tidak akan efektif. Sebaiknya pemerintah memusatkan kebijakan fiskalnya di perkotaan, karena kepadatan penduduk di perkotaan lebih besar, dan intensitas interaksi lebih besar.

kedua, karena kegiatan ekonomi akan terganggu karena berkurangnya interaksi, sebaiknya pemerintah untuk merencanakan kesehatan. Mengalokasikan anggaran, misalnya dengan memastikan pasien COVID-19 terdampak. Ini telah meningkat secara substansial, dan kebutuhan keuangan harus dibayarkan ke rumah sakit, dokter, obat-obatan, dan asuransi pasien. Setelah kondisi bisa diatasi dan aktivitas menjadi normal, dimana interaksi terjadi, baru lakukan demand manajemen melalui fiskal. Ketiga, perlu ada kebijakan fiskal dalam rangka memastikan kelompok menengah ke bawah terpenuhi kebutuhannya melalui bantuan sosial.

Keempat, pemerintah perlu merelokasikan belanja yang kurang penting dan bukan prioritas mengingat besarnya kebutuhan dana sembari meningkatkan defisit anggaran. Kelima, stok pangan perlu dipastikan ada agar tidak timbul kenaikan harga pangan yang bisa menimbulkan kepanikan ditengah masyarakat. Setelah situasi kembali normal. Barulah kebijakan counter cyclical baik dari fiskal maupun moneter dapat dilakukan untuk mendorong aggregate demand secara efektif (<https://ekonomi.bisnis.com>).

Berdasarkan surat edaran Kementerian Keuangan, nomor S-116/PK/2020 yang isinya. Pertama, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah tahun anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kedua, penyaluran dan

penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) tahun anggaran 2020, belanja wajib bidang kesehatan tersebut diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan atau penanganan Covid 19. Ketiga, pemerintah daerah yang menerima DID di luar kategori pelayanan publik dasar bidang kesehatan tetap mengutamakan pemanfaatannya untuk pencegahan dan/atau pengobatan Covid-19. Keempat, kerja sama dari Pemerintah Daerah untuk dapat menyusun kembali Rencana Penggunaan DID tahun Anggaran 2020 dengan memprioritaskan kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19. Kelima, pengalihan penggunaannya ke Kelompok Kategori lainnya, maka Pemerintah Daerah harus melampirkan surat pernyataan dengan melampirkan DPA yang memuat kegiatan pencegahan dan/atau penanganan corona telah dianggarkan dalam APBD.

SIMPULAN

Dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan menuntut kerjasama dengan pemerintah Daerah diseluruh wilayah Indonesia dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia harus dilaksanakan secara serentah yaitu untuk memutuskan rantai perkembangan virus corona yaitu dengan menerapkan kebijakan stay at home dan/atau lockdown selama 14 hari, sesuai dengan masa inkubasi virus Corona, sehingga wabah pandemi virus covid-19 dapat diselesaikan, namun dengan demikian ada konsekuensi harus ditanggung oleh pemerintah pusat dengan memberikan memberikan bantuan kepada seluruh warga masyarakat agar kebijakan stay at home atau lockdown bisa sukses. Adapun fasilitas yang harus disediakan untuk warga masyarakat yaitu: 1) Menyediakan ketersediaan kebutuhan pangan untuk masyarakat yang cukup sehingga tidak menimbulkan panik masyarakat; 2) Memberikan bantuan

sosial bagi masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga tidak menimbulkan/meningkatkan inflasi; 3) Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan khususnya dalam penanganan penyelesaian pandemi covid-19, khususnya dalam penanganan kasus kasus yang diakibatkan sakit akibat virus corona, diantaranya dengan menyiapkan rumah sakit rujukan pasien penderita covid-19, obat serta alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis yang merupakan garda terdepan dalam menangani dan melayani masyarakat untuk dapat sehat kembali seperti semula; dan 4) Pandemi Covid-19 akan sangat berdampak terhadap menurunnya pendapatan daerah juga akan menurunkan daya beli masyarakat serta berdampak pada peningkatan inflasi.

REFERENCES

- Akter, S. (2020). The impact of COVID-19 related 'stay-at-home' restrictions on food prices in Europe: findings from a preliminary analysis. *Food Security*, 12(4), 719-725. <https://doi.org/10.1007/s12571-020-01082-3>
- Dani, A. H., Herlinawati, C. H., Bakhri, S., Banowati, L., & Wahyuni, N. T. (2021). Kondisi Ekonomi , Stigma , dan Tingkat Religiusitas Sebagai Faktor dalam Meningkatkan Upaya Pencegahan Covid-19. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 8(2), 75-86. <https://doi.org/10.32539/JKK.V8I2.13306>
- Hamadani, J. D., Hasan, M. I., Baldi, A. J., Hossain, S. J., Shiraji, S., Bhuiyan, M. S. A., Mehrin, S. F., Fisher, J., Tofail, F., Tipu, S. M. M. U., Grantham-McGregor, S., Biggs, B. A., Braat, S., & Pasricha, S. R. (2020). Immediate impact of stay-at-home orders to control COVID-19 transmission on socioeconomic conditions, food insecurity, mental health, and intimate partner violence in Bangladeshi women and their families: an interrupted time series. *The Lancet Global Health*, 8(11), 1-10. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30366-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30366-1)
- Kim, J. Y., Han, J. O., & Lee, H. (2020). Recommendation for response to the COVID-19

pandemic: Korean context of “distancing in daily life,” considering vulnerable population. *International Journal for Equity in Health*, 19(1), 1–5. <https://doi.org/10.1186/s12939-020-01309-x>

Qarnain, S. S., Sattanathan, M., Sankaranarayanan, B., & Ali, S. M. (2020). Analyzing energy consumption factors during coronavirus (COVID-19) pandemic outbreak: a case study of residential society. *Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects*, 00(00), 1–20. <https://doi.org/10.1080/15567036.2020.1859651>

Ramdani, I. (2020). Analysis of The Cycling Trend During the Pandemic of COVID 19 Towards Small and Medium Enterprises (UMKM) Income. *International Journal of Social Science and Business*, 4(4), 528–535. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i4.29610>

Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109–120. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>

Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora*, 9(2), 57–65. <https://scholarhub.ui.ac.id/hubsasia>. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>

Toprak Celenay, S., Karaaslan, Y., Mete, O., & Ozer Kaya, D. (2020). Coronaphobia, musculoskeletal pain, and sleep quality in stay-at home and continued-working persons during the 3-month Covid-19 pandemic lockdown in Turkey. *Chronobiology International*, 37(12), 1–8. <https://doi.org/10.1080/07420528.2020.1815759>

Wahidmurni. (2017). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif: Vol. Juli (Nomor 1, hal. 1–17).

Witteveen, D. (2020). Sociodemographic inequality in exposure to COVID-19-induced economic hardship in the United Kingdom. *Research in Social Stratification and Mobility*, 69(August), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2020.100551>